

ABSTRAK

Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Batang mendorong warga untuk melepaskan hak atas tanahnya dengan kesepakatan dari pihak pemilik tanah dengan pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Batang sudah sesuai dengan Undang – Undang 2 Tahun 2012. Serta menganalisis kendala yang dihadapi dalam proses ganti kerugian dalam pembangunan PLTU Batang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dimana suatu penelitian dilihat dari sudut pandang ilmu hukum dan peraturan tertulis sebagai data sekunder. Namun melihat juga hubungan dan pengaruh hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian, dimana data primer tempat memperoleh data sebagai sumber pertama sehubungan dengan ganti kerugian dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses ganti kerugian pengadaan tanah di kabupaten Batang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembangunan pada proyek PLTU Batang terdapat kendala dalam pemberian ganti kerugian yang terdapat kendala berupa pemberian ganti kerugian yang belum sepenuhnya dapat di berikan kepada pihak yang bersangkutan, sehingga perlu diadakan upaya untuk mengatasinya berupa pembinaan terhadap warga serta masifnya penyuluhan bagi masyarakat yang terdampak pada ganti kerugian.

Kata Kunci: *Ganti kerugian, Pengadaan Tanah, PLTU*

ABSTRACT

Land acquisition is the activity of providing land by giving proper and fair compensation to the rightful parties. The Steam Power Plant in Batang Regency encourages residents to release their land rights with an agreement between the landowner and the government.

This study aims to determine whether the compensation process for land acquisition for the public interest of the Steam Power Plant in Batang Regency is in accordance with Law 2 of 2012. As well as analyze the obstacles encountered in the compensation process in the construction of the Batang PLTU.

The method used in this research is an empirical juridical approach where a research is seen from the point of view of legal science and written regulations as secondary data. However, it also sees the relationship and influence of law as a tool to regulate society by conducting direct research on the object of research, where primary data is the place to obtain data as the first source related to compensation in the process of land acquisition for the public interest in the Batang PLTU project.

The results of this study indicate that the process of compensation for land acquisition in Batang district is in accordance with statutory regulations. The development of the Batang PLTU project has obstacles in providing compensation in the form of compensation that has not been fully given to the parties concerned, so that efforts need to be made to overcome them in the form of guidance to residents and massive counseling for people affected by compensation.

Keywords: Compensation, Land Acquisition, Electric steam power plant